

ABSTRACT

Nisfatin Aulia, Mechanism of Recording Submission of Activity Budget and Letter of Accountability Based on Regional Financial Management Information System (SIPKD) at the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in Sampang Regency. Under the guidance of Emi Rahmawati, S.E., MSi

The letter of accountability is one of the important documents as a reference for the use of funds. Where this accountability letter is inputted into the Regional Financial Management Information System (SIPKD) which is one of the facilities set by the Ministry of Home Affairs as a tool to facilitate managing and checking the finances of a Regional Work Unit (SKPD) entity.

The purpose of this research is to study the mechanism in the submission of the budget to the preparation of the accountability letter and its input into the SIPKD carried out by the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) in Sampang Regency. The research uses descriptive qualitative data analysis methods and the use of data collection and interview techniques. The data used are general data which contains a general description of the entity and special data which contains a letter of responsibility from the subdivision to the expenditure treasurer.

The results of this study indicate that the use of the Regional Financial Management Information System (SIPKD) is in accordance with the guidelines set by the Ministry of Home Affairs. However, in the preparation of the accountability letter of the sub-section, there were still minor errors found by the correct team. For this reason, the author then gives advice to the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) entity, especially to the expenditure treasurer to make the same format of the accountability letter for each subdivision in order to facilitate the preparation and reduce the occurrence of errors in the preparation of the accountability letter.

Keywords: Regional Financial Management Information System, Surat

Accountability, SKPD

ABSTRAK

Nisfatin Aulia, Mekanisme Pencatatan Pengajuan Anggaran Belanja Kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban Berbasis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Dibawah bimbingan Emi Rahmawati, S.E., MSi

Surat pertanggungjawaban merupakan salah satu dokumen penting sebagai acuan keluarnya penggunaan dana. Dimana surat pertanggungjawaban ini dilakukan penginputan pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah salah satu fasilitas yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai alat untuk mempermudah melakukan pengelolaan dan pengecekan dalam keuangan sebuah entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tujuan dalam penelitian ini untuk mempelajari mekanisme dalam pengajuan anggaran sampai dengan penyusunan surat pertanggungjawaban dan penginputannya dalam SIPKD yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Sampang. Dalam penelitian menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif dan penggunaan teknik pengumpulan data dan wawancara. Data yang digunakan yaitu data umum yang berisi tentang gambaran umum entitas dan data khusus yang berisi tentang surat pertanggungjawaban dari subbagian kepada bendahara pengeluaran.

Hasil dari penelitian ini dilakukan menunjukkan bahwa dalam penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, penyusunan surat pertanggungjawaban oleh subbagian masih ada kesalahan kecil yang ditemukan oleh tim koreksi. Untuk itu, kemudian penulis memberikan saran kepada entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya kepada bendahara pengeluaran untuk membuat format surat pertanggungjawaban yang sama setiap subbagian agar mempermudah dalam penyusunan dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat pertanggungjawaban, SKPD